

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah fenomena yang mendunia, dimana kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkungan keluarga di berbagai belahan dunia, seperti kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis, hingga kekerasan fisik. Anggapan bahwa perempuan manusia lemah dan tidak lebih baik serta tidak lebih kuat dari laki-laki, semakin melegitimasi laki-laki untuk berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan.¹ Salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami perempuan telah menjadi masalah bersama bagi negara-negara di dunia, dan juga menjadi sebuah *problem* sosial yang harus mendapat perhatian khusus dalam mengatasinya.²

Kondisi obyektif demikian yang membuat perjuangan perempuan atas ketertindasan yang dialaminya semakin marak terjadi di berbagai negara di dunia.³ Gerakan perlawanan perempuan dalam perjuangannya untuk membela dan membebaskan perempuan dari belenggu ketertindasan juga terjadi di Filipina.

¹ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, 2007, *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Bandung: Institut Perempuan, hal. 11

² Simone De Beauvoir, 2016, *Second Sex: Kehidupan Perempuan (ed.2)*, Yogyakarta: Narasi, hal.362

³ Ahyar Anwar, 2009, *Geneologi Feminis*, Jakarta: Republika, hal. 24

Filipina mengalami hal yang serupa terkait kekerasan terhadap perempuan, karena Filipina merupakan salah satu negara yang tidak “ramah” kepada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diperjuangkan setiap hari oleh perempuan di Filipina. Terlebih lagi bahwa perempuan di Filipina hidup dalam kemiskinan dan budaya patriarki yang cukup kuat menggambarkan pada tatanan sosial yang cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal ini yang semakin membuat kekerasan berbasis gender di Filipina terus terjadi, dimana implementasinya menggambarkan dari beragamnya tindakan kekerasan yang dialami perempuan Filipina.⁴

Seperti halnya kekerasan yang dialami oleh perempuan diberbagai negara didunia, kekerasan yang dialami perempuan Filipina terjadi pada ranah domestik atau keluarga dan juga terjadi pada ranah publik. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan Filipina meliputi kekerasan fisik, seperti penganiayaan, penyiksaan, hingga pembunuhan; kekerasan seksual, seperti berbagai tindakan pelecehan seksual baik verbal/non verbal, pemerkosaan, perdagangan perempuan, prostitusi/perdagangan seks dll; kekerasan psikologis; kekerasan ekonomi, seperti beban kerja ganda, marginalisasi/diskriminasi pada sektor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dll; serta kekerasan oleh negara,

⁴ Johana G.S.D Poerba, *Patrick Ziegenhain: Indonesia Tertinggal dari Filipina dalam Pemberdayaan Perempuan*, diakses dalam <http://www.jurnalperempuan.org/berita/patrick-ziegenhain-indonesia-tertinggal-dari-filipina-dalam-pemberdayaan-perempuan> (17/12/2017. 10:15 WIB)

seperti adanya represi politik, akses yang terbatas untuk perawatan kesehatan reproduksi dan sebagainya.⁵

Namun pada penelitian ini, masalah kekerasan terhadap perempuan yang akan diangkat lebih berfokus pada aspek kekerasan seksual, yang notabene merupakan bentuk kekerasan yang terjadi pada ranah publik, dan juga dapat terjadi pula pada ranah domestik atau dalam keluarga. Kekerasan seksual ini menjadi fokus penelitian, dikarenakan kekerasan seksual senantiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat Filipina sehingga menjadi tindakan kekerasan yang sangat memberikan dampak buruk bagi kondisi sosial masyarakat, yang mana tindakan kekerasan seksual tersebut dapat mengancam perempuan Filipina dimanapun mereka berada.

Bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi di Filipina baik pada ranah domestik maupun ranah publik yang akan dibahas pada bab selanjutnya dalam penelitian ini yaitu berupa, pemerkosaan, termasuk percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan sedarah, pelecehan seksual baik verbal (godaan/rayuan/pernyataan seksis/pernyataan berbau seksualitas) ataupun non verbal (tindakan mesum/tindakan berbau seksualitas). Beberapa dari tindakan kekerasan tersebut menyebabkan berbagai macam dampak negatif seperti cedera fisik hingga gangguan psikologis yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.⁶

⁵ Myra Flor A. Rafal, *Indigenous Women in the Philippines and its Combat to Injustice: A Channel for Women's Reinforcement Operation*, IPEDR, Vol 5, No 2 (Musim 2011), Singapore: IACSIT Press, hal. 326.

⁶ Racidon P. Bernarte, *et al*, *Violence Against Women in the Philippines*, Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research (APJMR), Vol. 6, No. 1 (Autumn 2018), Manila: Polytechnic University of the Philippines, hal. 110.

Kekerasan seksual yang terjadi di Filipina menunjukkan jumlah yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang tercatat pada Kepolisian Nasional Filipina menunjukkan adanya 7881 kasus yang terjadi dari tahun 1997 hingga 2003. Rinciannya yaitu, tahun 1997 sebanyak 832 kasus, tahun 1998 sebanyak 1089 kasus, tahun 1999 sebanyak 1203 kasus, tahun 2000 sebanyak 1363 kasus, tahun 2001 sebanyak 1214 kasus, tahun 2002 sebanyak 1063, dan tahun 2003 terdiri dari 1117 kasus.⁷

Atas dasar kondisi sosial tersebut, GABRIELA muncul sebagai gerakan perlawanan perempuan yang berorientasi mengubah nasib perempuan menjadi lebih layak dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Filipina, salah satunya kekerasan seksual. GABRIELA dibentuk pada tahun 1984, merupakan koalisi perempuan dari lintas sektor, seperti buruh, petani, masyarakat adat, kaum miskin kota, dan kelas menengah, yang dibentuk saat perjuangan melawan kediktatoran Ferdinand Marcos. Gerakan ini memiliki peran dalam gerakan *people power* di Filipina untuk menggulingkan rezim diktator tersebut.⁸

Seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan politik masyarakat Filipina, GABRIELA kemudian mentransformasikan gerakannya lebih luas lagi dengan menjadi sebuah partai politik perempuan, yaitu bernama GABRIELA Women's Party (GWP). Kekerasan seksual yang terus dialami oleh perempuan

⁷ *A Deeper Look At Violence Against Women (VAW): The Philippine Case*, 2000, diakses dalam <http://www.monitor.upeace.org/pdf/Violence%20Against%20Women%20in%20the%20Philippines.pdf> (18/12/2017. 09.02)

⁸ Donna Maeda, *Agencies of Filipina Migrants in Globalized Economies: Transforming International Human Rights Legal Discourse*, diakses dalam <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=blrlj> (18/12/2017. 11:30 WIB)

di Filipina, sebagaimana data kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah dijelaskan diatas, menjadi salah satu alasan GWP untuk terus berjuang, baik pada sektor pemerintahan (parlemen) maupun non pemerintahan. Tujuan GWP untuk turut andil dalam pemerintahan atau parlemen salah satunya karena GWP ingin mengupayakan terbentuknya sebuah kebijakan yang dapat memperbaiki nasib perempuan Filipina, yaitu dengan turut serta dalam pembuatan undang-undang, terlibat dalam pembuatan kebijakan dan hukum. Dimana undang-undang, kebijakan dan hukum tersebut yang sifatnya ramah terhadap perempuan dan dapat mengakomodir kepentingan serta kebutuhan perempuan melalui reformasi kebijakan.⁹

Selain itu, kebijakan tersebut yang sifatnya dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui pembuatan hukum terkait bagaimana seharusnya masyarakat memposisikan perempuan dengan baik, sehingga dapat terbangun relasi antara perempuan dan laki-laki secara harmonis tanpa kekerasan ataupun ketidakadilan, serta menghadang langkah – langkah atau upaya yang akan merusak keamanan, perampasan hak-hak dan kesejahteraan perempuan, seperti terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual.¹⁰

Selama berada didalam parlemen, GWP juga berhasil menginisiasi serta mendorong terbentuknya kebijakan yang ramah terhadap perempuan, salah

⁹ *GABRIELA Women's Party*, diakses dalam [http://en.wikipedia.org/index.php/Gabriela Women's Party](http://en.wikipedia.org/index.php/Gabriela_Women's_Party) (18/12/2017. 14:35 WIB)

¹⁰ Liza Maza, *Women in Politics and Governance in the Philippines: The Gabriela Women's Party Experience*, diakses dalam <http://www.kalyanamitra.or.id/en/2013/05/women-in-politics-and-governance-in-the-philippines-the-gabriela-womens-party-experience/> (18/12/2017. 15:40 WIB)

satunya adalah Undang - Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Magna Carta of Women. Selain itu, didalam parlemen GWP juga selalu memberikan kontrol terhadap pemerintah, terutama terkait implementasi UU tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan GWP sebagai partai perempuan yang memiliki pengaruh sangat besar di Filipina.¹¹ Sedangkan diluar parlemen, GWP senantiasa melakukan berbagai kampanye dan advokasi bersama dengan perempuan Filipina dan masyarakat umum lainnya demi mencapai tatanan sosial yang lebih baik di Filipina.¹² Artinya, GWP bergerak dan berperan dalam dua sektor yaitu di dalam (intra) dan di luar (ekstra) parlemen. Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang yang ramah terhadap perempuan dan kontrol atas pemerintah menjadi peran GWP pada intra parlemen. Sementara, memberikan advokasi dan melakukan kampanye kepada masyarakat untuk melawan dan menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan peran yang dilakukan oleh GWP pada ekstra parlemen. Kedua sektor yang menjadi peran GWP ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

GWP menjadi partai politik perempuan pertama yang ada di dunia, dan telah menjawab sebuah persoalan bahwa perempuan juga layak untuk menjadi pemimpin dan menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan pada suatu negara. GWP merupakan sebuah gerakan perempuan yang sangat berpengaruh di Filipina, baik pada tataran sosial masyarakat maupun pada tataran pemerintahan. Hal inilah yang membuat GWP menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti lebih

¹¹ Buletin Perempuan Bergerak, *Agenda Baru Politik Perempuan*, diakses dalam www.kalyanamitra.or.id/files/bulletin/2013_edisi2.pdf (18/12/2017. 19:30 WIB)

¹² Liza Maza. *Op.Cit*

lanjut. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana GWP menjalankan perannya untuk mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah **Bagaimana Peran GABRIELA Women's Party dalam Mengurangi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina Tahun 2004-2016?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran GABRIELA Women's Party dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. Jika melihat pada kenyataannya, GABRIELA Women's Party merupakan satu-satunya partai politik perempuan yang memiliki *power* cukup besar untuk berperan aktif dalam memerangi tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan berkaitan dengan gerakan perempuan GABRIELA Women's Party dalam perannya mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi serta menjadi rekomendasi sekaligus referensi untuk pembaca, khususnya para civitas akademika pada program studi Hubungan Internasional mengenai gerakan perempuan GABRIELA Women's Party di Filipina sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Skripsi milik Isnawaty Endarsih dengan judul *"Peran Gerakan Women's Forum Australia (WFA) Tentang Sexual Harassment dan Sexual Violence Terhadap Perempuan di Australia"* penulis ingin menjawab rumusan masalah bagaimana pengaruh gerakan Women's Forum Australia (WFA) tentang *sexual harassment* dan *sexual violence* terhadap perempuan di Australia. Teori/konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Teori Feminisme dan Konsep Pressure Group. Penelitian tersebut menjelaskan tentang gerakan feminisme di Australia dengan karakteristik feminisme global yang fundamental. Isu – isu

tentang feminisme yang berkaitan dengan hak pilih serta akses perempuan dalam parlemen juga di perjuangkan oleh para feminis di Australia.

Women's Forum Australia (WFA) sebuah organisasi non profit atau NGO yang fokus terhadap pendidikan dan perkembangan kebijakan publik tentang sosial, ekonomi, kesehatan serta isu – isu yang berhubungan dengan perempuan di Australia. WFA mengangkat isu – isu umum yang berkaitan dengan perempuan seperti aborsi, adopsi, isu tentang body image, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi, dan *trafficking*. WFA telah memberikan masukan untuk pemerintah dan menjadi organisasi yang berpengaruh di Australia.

WFA berusaha mengadvokasi dan aktif mengkampanyekan isu-isu serta kepentingan perempuan. Di samping itu, mereka juga melakukan *research* untuk menguatkan opini-opini mereka dalam advokasinya untuk membangkitkan kesadaran perempuan-perempuan tentang apa yang mereka hadapi saat ini.¹³ Dalam tulisan milik Isnawaty Endarsih ini membahas tentang gerakan feminisme gelombang ketiga, yakni post-feminisme, feminitas dan gerakan non-governmental yaitu Women's Forum Australia (WFA) dan pengaruhnya terhadap kebijakan sexual harassment di Australia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang feminisme liberal dimana perempuan harus berpolitik, salah satunya dengan turut serta dalam pembuatan kebijakan dalam parlemen sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir. Dengan begitu, jika WFA merupakan gerakan perempuan yang sifatnya non-governmental dan kegiatannya

¹³ Isnawaty Endarsih, 2014, *Peran Gerakan Women's Forum Australia (WFA) Tentang Sexual Harassment dan Sexual Violence Terhadap Perempuan di Australia*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 5

berupa advokasi isu-isu perempuan dan melakukan penelitian-penelitian terhadap permasalahan perempuan, maka GABRIELA Women's Party (GWP) merupakan gerakan perempuan yang lebih *concern* dalam aspek penyadaran politik terhadap perempuan, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai partai politik untuk mengadvokasi kepentingan perempuan dalam pemerintahan di Filipina. Bentuk kegiatan advokasi GWP tidak hanya berada di dalam lingkup pemerintahan, tetapi juga dari luar pemerintahan berupa pendidikan dan pemberdayaan terhadap perempuan.

Lalu, skripsi milik Anita Sefti Nurlaili dengan judul "*Perjuangan Gerakan Perempuan Ukraina (Femen) dalam Mengurangi Tingkat Perdagangan Perempuan Ukraina di Eropa*". Penulis ingin menjawab rumusan masalah bagaimana perjuangan Femen dalam mengurangi tingkat perdagangan perempuan Ukraina di Eropa. Sejak awal berdirinya Femen sudah banyak melakukan berbagai aksi terkait dengan eksploitasi perempuan dan juga menentang legalisasi prostitusi dan *woman trafficking* di Ukraina. Femen merupakan organisasi perempuan yang bersifat radikal, hal ini dibuktikan dengan berbagai protes yang mereka lakukan melalui aksi telanjang dada.¹⁴ Jika dalam skripsi Anita membahas terkait gerakan perempuan yang bersifat radikal, maka dalam penelitian ini membahas tentang gerakan perempuan liberal, yang lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran terhadap kaum perempuan di Filipina. Apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh perempuan Ukraina dan Filipina sama,

¹⁴ Anita Sefti, 2014, *Perjuangan Gerakan Perempuan Ukraina (Femen) Dalam Mengurangi Tingkat Perdagangan Perempuan Ukraina Di Eropa*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4

terjadinya kekerasan domestic dan perdagangan perempuan. Namun dalam upaya untuk menyikapi persoalan tersebut, mereka memiliki gerakan yang sangat berbeda.

Kemudian pada skripsi Sekti Desy Handayani dengan judul "*Gerakan Perlawanan Perempuan The Gulabi's Gang Terhadap Ketidakadilan Perempuan di India*". Penulis ingin menjawab rumusan masalah mengapa *The Gulabi's Gang* muncul sebagai sebuah gerakan perlawanan di India. Penulis menggunakan teori gerakan sosial baru dan teori feminisme radikal. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa gerakan perempuan Gulabi's Gang yang terdiri dari kumpulan perempuan berseri pink dengan semangat juang tinggi untuk menghapuskan segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan di India. Gulabi's Gang merupakan gerakan feminisme radikal yang ingin melakukan suatu perubahan sosial baru di India.¹⁵ Dalam skripsi Sekti Desy menjelaskan mengenai gerakan perempuan yang bersifat radikal dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di India dan gerakannya berada di luar parlemen. Sedangkan, dalam penelitian ini menjelaskan tentang upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Jurnal milik Denny Ade Putra dkk dengan judul "*GABRIELA: Transformasi Gerakan Perempuan di Filipina*" jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menjelaskan bagaimana perjuangan GABRIELA dalam mengurangi kekerasan perempuan di Filipina yang pada awalnya berbentuk

¹⁵ Sekti Desy, 2015, *Gerakan Perlawanan Perempuan "The Gulabi's Gang" Terhadap Ketidakadilan Perempuan di India*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 7

organisasi sosial namun berganti menjadi sebuah Partai Politik perempuan sehingga lebih memiliki pengaruh lebih di Filipina.¹⁶ Dalam jurnal tersebut lebih menjelaskan mengenai transformasi GABRIELA sebagai sebuah gerakan sosial perempuan menjadi sebuah partai politik perempuan dengan nama GABRIELA Women's Party. Sedangkan dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang peran GABRIELA Women's Party (GWP) dalam upayanya mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan di Filipina.

Selanjutnya Skripsi milik Fike Nilam Sari dengan judul "*Pengaruh Demokratisasi terhadap Keterlibatan Perempuan India di Parlemen*". Pada skripsi tersebut lebih menekankan pada sistem demokrasi dan pemberdayaan perempuan di parlemen, dimana India yang sudah tergolong dalam negara demokratis ternyata dari segi pemberdayaan perempuan di parlemen masih sangat kurang karena kuatnya budaya patriarki dan sistem kasta.¹⁷ Sementara, GABRIELA Women's Party (GWP) yang merupakan partai politik perempuan pertama di Filipina, merupakan salah satu aktor penting yang menciptakan iklim demokrasi bagi perempuan Filipina. Artinya perempuan memperoleh akses lebih untuk terlibat dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan. Penelitian Fike Nilam Sari hanya sebatas ingin mengukur seberapa besar keterlibatan perempuan di parlemen. Sementara penelitian ini ingin lebih fokus kepada peran GWP dalam mengurangi permasalahan sosial dengan keterlibatannya di parlemen. Selain itu,

¹⁶ Deny Ade Putra, dkk, *GABRIELA: Transformasi Gerakan Perempuan di Filipina*, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, diakses dalam <https://www.google.com/url?Felisa.ugm.ac.id> (05/01/2018. 13:15 WIB)

¹⁷ Fike Nilam Sari, 2014, *Pengaruh Demokratisasi terhadap Keterlibatan Perempuan India di Parlemen*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 16

teori Feminisme yang digunakan dalam penelitian Fike hanya membahas teori Feminisme secara umum, dimana budaya patriarki digunakan sebagai argumen penjelas. Sementara pada penelitian GWP, lebih fokus kepada teori Feminisme Liberal, yang menggambarkan peran dan upaya GWP pada sistem pemerintahan.

Penelitian selanjutnya oleh Sri Hardjanti Widyastuti yang berjudul *“Gerakan Perempuan dan Perubahan Sosial: Studi terhadap Gerakan Perempuan Usaha Mikro dalam Menarasikan Identitas Diri sebagai Warga Masyarakat dan Warga Negara”*. Secara umum penelitian Sri Hardjanti mengkaji gerakan perempuan yang muncul dari akar rumput. Secara khusus mengkaji peran aktor gerakan perempuan dalam menjelaskan identitas dirinya sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pemikiran, pemahaman nilai dan mengubah kehidupan serta menggerakkannya untuk mempengaruhi perempuan lain dan anggota masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang adil dan lebih baik untuk perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa indepth interview kepada para aktor gerakan perempuan.¹⁸ Fokus dalam penelitian Sri Hardjanti menasar pada gerakan perempuan karena perempuan memiliki posisi sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat, Negara dan ekonomi pasar. Hal ini

¹⁸ Sri Harjanti Widyastuti, *Gerakan Perempuan dan Perubahan Sosial: Studi terhadap Gerakan Perempuan Usaha Mikro dalam Menarasikan Identitas Diri sebagai Warga Masyarakat dan Warga Negara* Universitas Indonesia, diakses dalam <http://digilibmbrc.fisip.ui.ac.id/mbrc/metadatapdf.jsp?id=50305&lokasi=lokal> (06/01/2018. 15:45 WIB)

menunjukkan bahwa gerakan perempuan mampu merubah tata kehidupan yang memberikan ruang bagi perempuan dan laki – laki.

Letak persamaan penelitian Sri Hardjanti dengan penelitian ini adalah pada kesamaan teori Feminis Liberal yang digunakan dalam mengkerangkai sebuah gerakan perempuan dalam upayanya untuk memperjuangkan hak – hak perempuan dan menciptakan kondisi sosial yang lebih adil. Kedua penelitian ini sama – sama memiliki asumsi bahwa ketidakadilan terhadap perempuan disebabkan karena sistem dan struktur sosial yang terdapat dimasyarakat dan Negara. Serta, pentingnya pendidikan, kultur, dan kesadaran perempuan sebagai bagian dari masyarakat sipi dalam memperjuangkan hak – hak mereka. Sementara itu perbedaan kedua penelitian ini terletak pada langkah perjuangannya. Jika pada penelitian Sri Hardjanti menggambarkan sebuah perjuangan gerakan perempuan yang diorganisir dalam wadah LSM, organisasi dan lain – lain, sementara pada penelitian ini dijelaskan perjuangan gerakan perempuan untuk mencapai keadilan sosial yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem atau pemerintahan, yaitu GABRIELA Women's Party sebagai partai politik perempuan yang berusaha memaksimalkan perannya untuk dapat menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah skripsi milik Nurul Fajriani dengan judul *Gerakan GABRIELA Women's Party Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Filipina*. Secara umum skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana GABRIELA bergerak menjadi sebuah partai politik perempuan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Filipina. Dalam skripsi ini lebih

berfokus kepada partisipasi perempuan dalam berpolitik yang dapat menjadi salah satu kunci untuk melepaskan perempuan dari fenomena kekerasan tersebut. GWP telah menjadi wakil dari seluruh perempuan di Filipina untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Selain menjadi wakil dari perempuan Filipina, GWP juga senantiasa memberikan penyadaran kepada perempuan secara umum terkait pentingnya perempuan untuk terjun ke dunia politik demi terciptanya aturan dan hukum yang lebih baik. Sebagai partai politik perempuan, GWP telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik demi mengurangi diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang GABRIELA Women's Party sebagai sebuah partai politik perempuan dalam mengurangi masalah kekerasan terhadap perempuan di Filipina. Selain itu, persamaannya adalah kedua penelitian ini sama – sama menggunakan teori Feminisme liberal. Sementara perbedaannya adalah jika skripsi milik Nurul Fajriani lebih fokus kepada bagaimana GABRIELA bergerak menjadi sebuah partai politik perempuan yang mengusung para perempuan independen untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik demi terwujudnya keadilan bagi perempuan. Dengan kata lain, skripsi tersebut lebih berfokus kepada bagaimana GABRIELA bergerak sebagai partai politik untuk berpartisipasi dalam politik agar dapat mengurangi kekerasan perempuan di Filipina. Sementara pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana peran GWP sebagai partai politik dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina melalui

¹⁹ Nurul Fajriani, 2016, *Gerakan GABRIELA Women's Party Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Filipina*, Skripsi, Samarinda: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, hal. 17

jalur intra pemerintahan/parlemen dan ekstra pemerintahan/parlemen. Melalui jalur intra parlemen, GWP berperan secara aktif dalam menginisiasi undang – undang dan hukum yang adil bagi perempuan. Sementara di ekstra parlemen, GWP mengambil peran dalam aspek advokasi dan kampanye terhadap masyarakat agar tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dalam masyarakat dapat diminimalisir.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	<p>“Peran Gerakan Women’s Forum Australia (WFA) Tentang Sexual Harassment dan Sexual Violence Terhadap Perempuan di Australia”</p> <p>Skripsi milik: Isnawaty Endarsih</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Teori/Konsep:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feminisme 2. Pressure Group 	<p>Australia sebagai negara maju juga concern terhadap permasalahan kaum perempuan. Terbentuknya forum perempuan Australia atau Women’s Forum Australia (WFA) ditahun 2004 dapat membantu menyalurkan aspirasi kaum perempuan. WFA dengan research yang dilakukannya memberikan dukungan penuh terhadap Australia National Plan 2010-2022 untuk mengurangi dan melindungi perempuan dari kekerasan yang kemudian diharapkan menjadi solusi bagi kehidupan perempuan di Australia yang lebih baik.</p>
2	<p>“Perjuangan Gerakan Perempuan Ukraina (Femen) dalam Mengurangi Tingkat Perdagangan Perempuan Ukraina di Eropa”</p>	<p>Eksplanatif</p> <p>Teori/Konsep:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Human Trafficking 2. Feminisme Radikal 3. Global Civil Society 	<p>Di Eropa perdagangan perempuan disebut juga sebagai perbudakan modern. Perempuan yang paling diminati berasal dari Ukraina. Ukraina adalah pemasok terbesar perdagangan perempuan. oleh karena itu Femen sebagai gerakan</p>

	<p>Skripsi milik : Anita Sefti Nurlaili</p>		<p>perempuan Ukraina menjadikan permasalahan tersebut sebagai salah satu isu dalam setiap aksinya. Femen berusaha menghapuskan sistem patriarki yang menyebabkan banyaknya penindasan terhadap perempuan.</p>
3	<p>“Gerakan Perlawanan Perempuan The Gulabi’s Gang Terhadap Ketidakadilan Perempuan di India”</p> <p>Skripsi milik : Sekti Desy Handayani</p>	<p>Eksplanatif deduktif</p> <p>Teori/Konsep: 1. Gerakan Sosial Baru 2. Feminisme Radikal</p>	<p>Gerakan ini muncul atas dasar rasa solidaritas kaum perempuan yang ingin memperjuangkan keadilan sosial perempuan di India dan kemunculan Gulabi’s Gang sendiri mempunyai sifat yang radikal dilihat dari adanya aksi kolektif yang dilakukan oleh perempuan di India dan gagasan/ide radikal yang diangkat oleh adanya kemunculan gerakan perlawanan perempuan tersebut hingga mampu menciptakan suatu perubahan sosial baru di India.</p>
4.	<p>“GABRIELA: Transformasi Gerakan Perempuan di Filipina”</p> <p>Jurnal milik : Denny Ade Putra, dkk</p>	<p>Kualitatif</p> <p>Teori/Konsep: Feminisme</p>	<p>Menjelaskan sebuah transformasi gerakan sosial perlawanan perempuan GABRIELA menjadi sebuah gerakan yang berbentuk partai politik yang mandiri dengan nama GABRIELA Women’s Party (GWP). Meskipun telah bertransformasi menjadi sebuah partai, tidak lantas membuat orientasi perjuangan GWP ikut berubah. Justru dengan memiliki status yang cukup berpengaruh bagi negara, GWP semakin menunjukkan taringnya dalam memperjuangkan keamanan serta kedudukan perempuan di Filipina.</p>

5.	<p>“Pengaruh Demokratisasi terhadap Keterlibatan Perempuan India di Parlemen”</p> <p>Skripsi milik : Fike Nilam Sari</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Teori/Konsep: 1. Konsep Demokratisasi 2. Teori Feminisme</p>	<p>Adanya kasta dan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat India, menjadi faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan masih sangat kurang. Padahal di sisi lain, India merupakan negara demokrasi yang sangat besar.</p>
6.	<p>“Gerakan Perempuan dan Perubahan Sosial: Studi terhadap Gerakan Perempuan Usaha Mikro dalam Menarasikan Identitas Diri sebagai Warga Masyarakat dan Warga Negara”</p> <p>Penelitian milik : Sri Hardjanti Widyastuti</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Teori/Konsep: 1. Gerakan Sosial Baru 2. Feminisme Liberal</p>	<p>Gerakan perempuan memiliki peranan penting dalam perubahan tatanan sosial yang lebih adil. Karena melalui keadilan sosial dapat tercipta harmonisasi antara perempuan dan laki – laki dalam menjalankan perannya sebagai masyarakat dalam bernegara. Untuk menuju kepada keadilan sosial tersebut sangat diperlukan pendidikan yang baik dan kesadaran bagi perempuan untuk mampu bergerak dan memaksimalkan potensinya sebagai masyarakat yang juga memiliki posisi penting sebagai warga negara dan pelaku ekonomi.</p>
7.	<p>“Gerakan GABRIELA Women’s Party Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Filipina”</p> <p>Skripsi Milik Nurul Fajriani</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Teori/Konsep: 1. Feminisme Liberal 2. Gerakan Sosial Baru</p>	<p>Partai perempuan GABRIELA sebagai partai politik dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan Filipina. Dengan partisipasi perempuan dalam politik diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk melepaskan perempuan dari belenggu diskriminasi. GWP telah menjadi contoh dari seluruh perempuan di Filipina untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik. Selain itu, GWP juga senantiasa memberikan penyadaran kepada perempuan secara umum terkait pentingnya</p>

			perempuan untuk terjun ke dunia politik demi terciptanya aturan dan hukum yang lebih baik.
8	“Peran GABRIELA Women’s Party dalam Mengurangi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina Tahun 2004 – 2016”.	Deskriptif Teori/Konsep: Teori Feminisme Liberal Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan	GABRIELA Women’s Party (GWP) merupakan partai politik perempuan di Filipina yang berfokus untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam penelitian ini berfokus kepada masalah kekerasan seksual yang dialami perempuan Filipina. GWP memiliki tujuan agar terbentuknya sebuah kebijakan yang berkeadilan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. GWP beranggapan bahwa melalui kebijakan yang berkeadilan dan ramah terhadap perempuan, maka akan dapat mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, GWP juga senantiasa berjuang di luar pemerintahan, yaitu dengan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan advokasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. GWP berupaya untuk berperan dan berjuang baik pada intra parlemen maupun ekstra parlemen.

1.5 Landasan Teori dan Konsep

1.5.1 Teori Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Feminisme Liberal

Feminisme liberal memiliki pandangan bahwa suatu negara seharusnya memiliki landasan teori pluralisme negara yang tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Namun pada kenyataannya, negara cenderung di dominasi oleh kaum laki-laki, dan direfleksikan menjadi berbagai kepentingan yang bersifat maskulin yang diskriminatif. Hal itu terjadi karena sistem pemerintahan atau negara cenderung dikuasai dan dipengaruhi oleh kekuatan laki-laki.²⁰

Feminisme liberal juga menolak pandangan bahwa dalam suatu negara, perempuan tidak memiliki otoritas lebih dan perempuan hanya sebatas sebagai warga negara yang tidak perlu untuk turut serta sebagai aktor pembuat kebijakan, karena hal tersebut bagi feminisme liberal menyebabkan adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal berpolitik atau bernegara. Oleh karena itu, ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak politik dan kesempatan di ranah publik harus diberikan jika masyarakat ingin mencapai suatu keadilan gender. Perempuan harus dalam posisi tidak hanya untuk mengekspresikan pandangan politik personal seseorang, tetapi juga perlu terlibat aktif dalam perubahan sistem dan struktur. Sehingga dengan demikian, perempuan dapat memberikan

²⁰ Stevi Jackson dan Jackie Jones, 2009, *Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 43

kontribusinya dengan maksimal terhadap lingkungan dan negaranya.²¹ Pandangan Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” tersebut cukup memiliki pengaruh terhadap perkembangan wacana kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik, seperti terlibat dalam pemerintahan dan membuat kebijakan di sebuah negara.²²

Kelompok feminis liberal termasuk yang paling moderat di antara kelompok feminis lainnya. Kelompok ini membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total didalam berbagai peran, seperti dalam peran ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dengan demikian tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin tertentu yang lebih mendominasi, karena kelompok ini memandang bahwa salah satu opresi terhadap perempuan karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik.²³ Sedangkan organ reproduksi perempuan bukan merupakan penghalang terhadap peran-peran tersebut.

Hal diatas menunjukkan bahwa dalam perspektif feminisme liberal, pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial dan politik menjadi salah satu yang menjadi perhatian untuk diterapkan dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan perempuan dalam peran ekonomi, sosial dan politik, maka akan membuat perempuan menjadi berdaya dan lambat laun akan mengurangi atau bahkan menghapus dominasi laki-laki dalam masyarakat.

²¹ Rosemarie Putnam Tong, 1998, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (ed. 2), Yogyakarta: Jalasutra, hal 28-38

²² *Ibid.* hal 40

²³ Ani Purwanti, 2009, *Feminisme Mengubah Masyarakat*, Semarang: PT. Suara Merdeka Press, hal. 2-3.

Dengan begitu, tingkat kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat juga akan berkurang. Peran perempuan dan laki-laki yang seiring sejalan dalam masyarakat, dengan tidak adanya dominasi dari salah satu jenis kelamin, akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁴

Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Oleh karena itu, feminisme liberal lebih memfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala undang-undang, kebijakan-kebijakan dan hukum yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kemudian, menciptakan lembaga politik dan sosial yang akan memaksimalkan kebebasan individu tanpa merusak kesejahteraan masyarakat menjadi landasan berfikir feminisme liberal. Feminis liberal lebih cenderung kepada liberalisme yang berorientasi kepada kesejahteraan. Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli akan kebebasan untuk berkembang.²⁵

Feminisme Liberal berpandangan hanya di dalam masyarakat yang seperti itulah perempuan dan juga laki-laki dapat mengembangkan diri dengan baik. Aspek mengembangkan diri ini salah satunya adalah laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang setara, baik pendidikan formal ataupun non formal. Perempuan ataupun laki-laki harus mendapatkan edukasi yang komprehensif, karena hal itu juga dapat menciptakan relasi yang seimbang dan

²⁴ *Ibid. hal. 7*

²⁵ Rosmarie Putnam Tong, *Op.Cit*

non diskriminatif antara keduanya, sehingga dapat meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan.²⁶

Selayaknya teori pemberdayaan perempuan dalam perspektif feminisme liberal yang telah dijabarkan di atas, GWP juga memperjuangkan tujuan yang sama, yakni berjuang untuk mendapatkan segala bentuk keadilan dan hak bagi perempuan Filipina, seperti hak untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk berpolitik, dan lain sebagainya.

Untuk dapat mencapai tujuannya, GWP berusaha terlibat secara langsung didalam sistem pemerintahan dengan menjadi lembaga politik berupa partai politik perempuan yang mandiri. Tujuan GWP untuk terlibat secara langsung di dalam pemerintahan karena ingin terlibat dan mendorong pemerintah dalam pembuatan undang-undang, kebijakan-kebijakan dan hukum yang ramah terhadap perempuan, anti diskriminatif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan orientasi feminisme liberal yang menyatakan bahwa persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dapat terjamin pelaksanaannya ketika ditunjang oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Selain itu, dengan terlibat dalam pemerintahan, GWP ingin menunjukkan bahwa perempuan harus pula diberi peran politik agar perlakuan diskriminatif yang sering dialami perempuan tidak terjadi lagi. Seperti pandangan dari feminisme liberal pula, GWP memiliki prinsip bahwa nasib perempuan dapat berubah menjadi lebih baik jika aturan dan hukum pada suatu negara dapat berlaku adil, tanpa memihak kepada suatu kelompok tertentu.

²⁶ *Ibid.* hal 50

Disamping itu, GWP juga berupaya dengan mengintegrasikan perempuan dalam berbagai peran dalam masyarakat, yaitu peran sosial, politik dan lain-lain. Dengan langkah ini, GWP ingin mengupayakan perempuan Filipina untuk dapat lebih mengambil peran didalam masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan agar tidak ada dominasi dari salah satu jenis kelamin didalam masyarakat tersebut. Ketiadaan dominasi juga akan berakibat pada berkurangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan di Filipina, dimana GWP juga berjuang untuk memerangi setiap tindakan yang bersifat kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual. Hal ini karena, kekerasan seksual yang dialami perempuan dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk, baik bagi korban, lingkungan maupun negara. GWP juga senantiasa berjuang untuk membuat perempuan Filipina berani memperjuangkan kelayakan nasibnya.

GWP senantiasa aktif melakukan edukasi yang komprehensif mengenai isu-isu perempuan kepada perempuan dan masyarakat umum Filipina. Meskipun GWP adalah sebuah partai politik, namun GWP beranggapan bahwa selain perlunya berjuang didalam sistem pemerintahan, juga perlu untuk terus berjuang diluar sistem pemerintahan, yaitu ditengah-tengah masyarakat secara umum, dan kaum perempuan secara khusus. Upaya edukasi kepada perempuan dan masyarakat umum ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman untuk tidak bertindak saling menindas. Upaya edukasi yang dilakukan GWP juga bertujuan agar masyarakat sama-sama memiliki kesadaran dan saling bekerjasama untuk menentang dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Filipina.

1.5.2 Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan rumusan *Platform For Action and Beijing Declaration* yang dihasilkan dalam Konferensi Perempuan Dunia yang dilakukan di Beijing pada tahun 1995 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk perilaku atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan bahkan kesengsaraan pada perempuan baik secara fisik, seksual, maupun mental atau psikologis. Tindakan ini seringkali disertai dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan ancaman, pemaksaan atau bahkan perampasan kemerdekaan atau hak asasi secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam ranah publik atau dalam lingkungan kehidupan yang bersifat privat/domestik (keluarga).²⁷

Kekerasan terhadap perempuan kerap kali terjadi karena eksisnya ketidakadilan gender atau kekerasan berbasis gender di tengah masyarakat yang didukung oleh budaya patriarki (dominasi laki – laki). Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah daripada laki-laki menggambarkan ketidakadilan gender tersebut. Laki-laki seakan mempunyai posisi yang lebih tinggi sehingga menjadikan perempuan sebagai manusia yang dapat dikontrol, dikuasai dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Posisi ini pula yang kemudian menjadikan laki-laki seolah memiliki “hak lebih” atas perempuan, dimana tindak

²⁷ *Platform For Action and Beijing Declaration* diakses dalam <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf> (25/03/2018. 09:15 WIB)

kekerasan dicap sebagai tindakan yang lazim untuk diberikan kepada perempuan demi mempertegas posisinya tersebut.²⁸

Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) kemudian menjadi sebutan yang ditujukan khusus bagi korban kejahatan atau tindakan kekerasan yang secara spesifik ditimpakan kepada perempuan karena mereka bertubuh perempuan, yang notabene dalam masyarakat dipandang sebagai kelas kedua setelah laki-laki. Kekerasan berbasis gender ini semakin terangkat ke permukaan mengingat terjadi hampir di semua aspek kehidupan. Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) merupakan tindak kekerasan yang diakibatkan oleh relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta ditandai dengan relasi yang *powerless* dan *powerful* antara keduanya.²⁹

Kekerasan terhadap perempuan sejatinya telah menjadi perhatian dunia. Hal ini ditandai dengan adanya Deklarasi Universal mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang pada pasal 3 telah secara tegas menyebutkan delapan butir hak perempuan yang mesti diakui dan diimplementasikan yaitu, hak atas kehidupan; hak atas persamaan; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak atas perlindungan yang sama di muka umum; hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi; hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya; hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik; hak untuk tidak mengalami

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 48-49

penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.³⁰

Selain karena adanya pandangan bias gender yang terjadi di tengah – tengah masyarakat dan mengakibatkan kekerasan berbasis gender, feminisme berpandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga disebabkan oleh adanya budaya patriarki (dominasi laki – laki) dalam suatu masyarakat dan negara. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, sebagai manusia superior yang memiliki kelas pertama dalam masyarakat, serta sebagai manusia kuat yang memiliki wewenang dan kehendak untuk menaklukkan dan menguasai. Patriarki memiliki peran sangat kuat dalam mempengaruhi sebuah masyarakat untuk bertindak sewenang-wenang dan mempengaruhi sebuah negara untuk bertindak tidak adil serta tidak memihak kepada perempuan, yaitu ditunjukkan melalui tidak tegasnya suatu negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan juga kurang diperhatikannya pembentukan kebijakan atau hukum yang dapat mengatasi tindakan kekerasan tersebut.³¹

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam ranah publik dan juga dalam ranah domestik/keluarga. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan baik pada ranah publik ataupun ranah domestik sebenarnya tidak jauh berbeda. Kekerasan yang terjadi pada ranah publik juga dapat terjadi pada ranah domestik, begitupula sebaliknya. Bentuk kekerasan yang terjadi pada ranah publik umumnya meliputi

³⁰ *Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dikutip dalam <https://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=387&lang=in> (25/03/2018. 13:45 WIB)

³¹ Luh Ayu Saraswati, 2000, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hal. 40-41

kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara itu, pada ranah domestik juga dimungkinkan untuk terjadinya tindakan kekerasan seperti pada ranah publik. Namun, yang membedakan adalah jika kekerasan pada ranah publik dilakukan oleh masyarakat umum/masyarakat sipil dan juga dapat pula dilakukan oleh pemerintah/negara, sedangkan kekerasan domestik dilakukan oleh anggota keluarga didalam rumah tangga (KDRT).³²

Berdasarkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang telah disebutkan diatas, salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat menyita perhatian adalah kekerasan seksual. Hal ini karena kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang sangat banyak dialami oleh perempuan, baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual, usaha untuk memperoleh seks, ucapan atau pendekatan seksual seperti apapun atau menjualbelikan seseorang sebagai objek seksual secara paksa, hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun tidak mempedulikan hubungannya dengan korban, dan itu dapat terjadi di ranah publik ataupun ranah domestik. Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan, dimana pemaksaan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk tindakan. Selain pemaksaan secara fisik, mencakup pula intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman, dalam kekerasan seksual tidak hanya menyangkut persoalan pemaksaan seksualitas saja, namun juga karena adanya kehendak untuk menguasai dan menaklukkan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi saat korban tak dapat menolak

³² Romany Sihite, *Op. Cit.* Hlm 50-53

tindakan seksual, misalnya ketika berada dibawah pengaruh alkohol, dalam pengaruh obat-obatan, ataupun mengalami gangguan secara mental/keterbelakangan mental.³³

Seperti halnya konsep kekerasan terhadap perempuan yang diuraikan diatas, kekerasan terhadap perempuan di Filipina juga merupakan tindakan yang disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat serta karena adanya kekerasan berbasis gender. Budaya patriarki dan kekerasan berbasis gender yang terdapat di Filipina ditunjukkan dengan adanya hubungan *powerless* dan *powerfull* antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki Filipina merasa memiliki kekuasaan dan wewenang lebih atas perempuan. Berdasarkan kondisi seperti ini, maka laki-laki senantiasa didorong oleh keinginan untuk menguasai dan menaklukkan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta terkait kondisi perempuan di Filipina yang diposisikan sebagai manusia kelas kedua dibawah laki-laki, sebagai manusia lemah dan inferior yang sering diperlakukan sewenang-wenang. Kondisi tersebut membuat para perempuan di Filipina sering mendapatkan perlakuan berupa tindakan kekerasan.

Sama halnya dengan fenomena yang terjadi secara global dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual juga menjadi kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan di Filipina. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Filipina yaitu seperti, pemerkosaan termasuk percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan sedarah, pelecehan seksual baik secara verbal ataupun non verbal, yang mana tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi

³³ World Health Organization (WHO), *Sexual Violence*, Chapter 6, diakses dalam http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf (26/03/2018. 12:52 WIB)

di ranah publik dan juga di ranah domestik. Tindakan kekerasan seksual tersebut berpotensi menimbulkan cedera fisik dan gangguan psikologis bagi perempuan. Tindakan kekerasan seksual ini serupa dengan definisi kekerasan terhadap perempuan yang telah disebutkan diatas berdasarkan rumusan *Platform For Action and Beijing Declaration*. Hal tersebut merupakan produk dari kekerasan berbasis gender dan didukung kuat oleh mengakarnya budaya patriarki di Filipina.

Kekerasan seksual terhadap perempuan Filipina yang terjadi di ranah publik maupun ranah domestik atau keluarga menunjukkan adanya perampasan hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dimuka umum, hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, serta hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain dan perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Perlakuan ini tentu tidak sejalan dengan hak-hak perempuan yang tertuang dalam Deklarasi Universal mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Filipina merupakan negara yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sangat kuat. Hal ini tercermin salah satunya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak menguntungkan perempuan. Pemerintah juga kurang tegas dan cenderung mengabaikan perilaku masyarakat dan kaum elit yang melakukan berbagai macam kekerasan seksual terhadap perempuan Filipina. Perempuan Filipina seakan kehilangan haknya sebagai manusia dan warga negara untuk mendapatkan keamanan dan keadilan. Oleh karena itu, dengan kondisi

sosial politik yang demikian tidak mengherankan jika kekerasan seksual terhadap perempuan baik pada ranah publik ataupun domestik masih banyak terjadi.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting digunakan saat melakukan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian dapat membuat hasil penelitian menjadi lebih tepat dan akurat, serta menjadikan penelitian lebih sistematis dan komprehensif. Serta untuk mempermudah peneliti dalam mengatasi setiap kesulitan dalam penelitian.

1.6.1 Jenis/Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau fenomena secara objektif.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Data-data diperoleh dari berbagai literatur yang akurat dan terpercaya seperti buku, skripsi, e-book, jurnal, artikel, dan berbagai situs internet lainnya yang telah disebutkan sumbernya.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah Induksionis. Induksionis merupakan teknik menganalisis data dengan cara mengumpulkan, memilah, mengelompokkan dan menganalisis data mengenai fenomena yang diteliti secara lengkap, rigid dan kronologis. Hasil analisis ini kemudian mempengaruhi proses pembentukan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.³⁴

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Dalam upaya untuk menghindari terjadinya penelitian yang berjangkauan luas, maka penelitian ini memerlukan batasan materi yang jelas. Upaya pembatasan materi ini dimaksudkan agar peneliti dapat secara fokus dan terarah dalam membahas objek yang diteliti. Selain itu juga dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data secara efektif. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Peran GABRIELA Women's Party (GWP) dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. Peran yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran dari GWP dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina melalui dua jalur, yaitu jalur intra parlemen dan jalur ekstra parlemen. Sementara itu, latar belakang dipilihnya kekerasan seksual sebagai objek permasalahan dalam penelitian ini adalah karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap

³⁴ Mohtar Mas'oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 92-93

perempuan yang sangat sering terjadi di Filipina. Selain itu, kekerasan seksual juga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berdampak sangat luas, termasuk terjadinya bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan psikologis dan kekerasan fisik. Kekerasan seksual yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pemerkosaan (ranah publik dan domestik), serta pelecehan seksual yaitu berupa pelecehan seksual secara verbal dan non verbal.

b. Batasan Waktu

Untuk menghindari terjadinya masa waktu yang sangat lama sehingga tidak relevan dan untuk menghindari kerancuan dalam periodisasi penelitian, maka penelitian ini memiliki ruang lingkup dari tahun 2004-2016. Batasan waktu tersebut ditentukan karena dua sebab. Pertama, untuk waktu dari tahun 2004 dipilih karena pada tahun tersebut GABRIELA Women's Party menjadi sebuah partai politik yang mandiri. Sementara itu yang kedua, rentang waktu hingga tahun 2016 diambil karena melihat periodisasi dua rezim pemerintahan yang berkuasa di Filipina yaitu rezim Gloria Macapagal Arroyo pada tahun 2001-2010 dan rezim Benigno Aquino III pada tahun 2010-2016.

1.7 Argumen Pokok

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina terjadi dikarenakan kondisi masyarakat dan pemerintah Filipina dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat serta karena pemahaman relasi antara perempuan dan laki – laki yang bias gender atau karena adanya kekerasan berbasis gender. Negara yang

seharusnya menjadi pihak yang menjamin keamanan warga negaranya justru cenderung membiarkan dan acuh tak acuh terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Tidak ada bentuk nyata dari tindakan pemerintah untuk menangani secara tegas setiap kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan Filipina.

Kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus terjadi di Filipina dan karena lemahnya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut yang menjadi salah satu alasan bagi GABRIELA Women's Party (GWP) untuk terlibat dalam perpolitikan Filipina. Berdasarkan pandangan dari Feminisme Liberal, cara efektif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan untuk mengkomodifikasi kepentingan perempuan, selain melalui jalur pendidikan, advokasi, maka juga harus terciptanya undang-undang atau kebijakan yang dapat menjamin keamanan dan keadilan bagi perempuan, yaitu dengan turut serta terlibat dalam perpolitikan untuk mengupayakan terwujudnya undang-undang yang berpihak kepada persoalan perempuan.

Feminisme Liberal sangat membuka lebar akses bagi perempuan untuk terjun dalam dunia politik dan ikut serta dalam membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan. Untuk itu GWP berjuang dengan terlibat secara langsung didalam sistem pemerintahan (parlemen), namun juga senantiasa berjuang di luar pemerintahan bersama perempuan dan masyarakat sipil lainnya untuk menciptakan sistem pemerintahan maupun tatanan sosial yang lebih berpihak kepada perempuan. Melalui perjuangan pada intra parlemen, GWP senantiasa berupaya untuk menjadi pengaruh, menginisiasi pembuatan undang-undang yang

berpihak pada perempuan serta mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan persoalan perempuan.

Sementara itu, perjuangan GWP pada ekstra parlemen yaitu berjuang dengan mengadvokasi, mengedukasi dan memobilisasi masyarakat agar menjadi warga negara yang melek, kritis dan berkesadaran untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik bagi tatanan sosial Filipina. Tentunya dengan tatanan masyarakat yang tanpa kekerasan dan tanpa saling menindas, mengakibatkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat teratasi dan terminimalisir, terutama kekerasan seksual yang senantiasa dialami perempuan Filipina.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, peneliti akan menjabarkan bagian dalam Bab Penelitian. Penelitian ini akan disusun menjadi lima Bab. Kelima Bab ini kemudian akan saling berkaitan untuk menjelaskan mengenai Peran GABRIELA Women's Party dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan di gambarkan dalam tabel berikut

BAB	JUDUL	ISI
Bab 1	Pendahuluan	Pada Bab ini dapat disebut dengan Bab Pendahuluan yang terdiri dari: 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian

		1.3.2 Manfaat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Teori dan Konsep 1.6 Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1 Jenis/Tipe Penelitian 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Teknik Analisa Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
Bab II	Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina dan Gambaran GABRIELA Women's Party	Pada Bab ini berisi tentang penjabaran mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina, serta gambaran umum mengenai GABRIELA Women's Party, yang akan dibahas dalam point-point berikut: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina 2.2 Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Ranah Publik <ul style="list-style-type: none"> A. Pemerkosaan B. Pelecehan Seksual 2.2.2 Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Ranah Domestik 2.2.3 Dampak Kekerasan Seksual <ul style="list-style-type: none"> A. Cedera Fisik B. Gangguan Psikologis 2.3 Gambaran Umum GABRIELA Women's Party <ul style="list-style-type: none"> 2.3.1 Sejarah Terbentuknya GABRIELA Women's Party 2.3.2 Profil GABRIELA Women's Party 2.3.3 Perkembangan GABRIELA Women's Party
Bab III	Peran GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Intra Parlemen	Pada Bab ini berisi uraian tentang peran GABRIELA Women's Party pada Intra Parlemen, serta bagaimana dampak dan kendalanya. Akan dirinci pada point-point berikut: <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Induksi Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Filipina dalam Partai dan Parlemen <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 Inisiasi Pembuatan Undang-Undang

		<p>A. Undang-undang Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (R.A. 9262)</p> <p>B. Magna Carta of Women (R.A. 9710)</p> <p>3.2 Kontrol Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang</p> <p>3.3 Dampak Politik GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Intra Parlemen</p> <p>3.4 Kendala Politik GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Intra Parlemen</p>
Bab IV	Peran GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Ekstra Parlemen	<p>Pada Bab ini berisi tentang peran GABRIELA Women's Party pada Ekstra Parlemen, serta akan diuraikan bagaimana dampak dan kendalanya, yang akan diuraikan melalui point-point berikut:</p> <p>4.1 Advokasi Terhadap Masyarakat</p> <p>4.2 Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Seksual</p> <p>4.3 Sosialisasi dan Kampanye Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan</p> <p>4.4 Dampak Sosial GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Ekstra Parlemen</p> <p>4.5 Kendala Sosial GABRIELA Women's Party Melalui Jalur Ekstra Parlemen</p> <p>4.6 Pencapaian GABRIELA Women's Party dalam Mengurangi Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2004-2016</p>
Bab V	Penutup	<p>Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan rangkuman dari penegasan kembali hasil penelitian secara menyeluruh. Sedangkan saran yang berisi tentang pendiskusan lebih lanjut yang dapat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Keduanya akan dibahas pada point-point berikut:</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>
	Daftar Pustaka	Daftar pustaka berisi tentang keseluruhan daftar bacaan atau referensi yang menjadi sumber rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.